

**Perlindungan Hukum Kreditur Selaku Pemegang Jaminan Fidusia  
Dalam Kepailitan Atas Harta Kekayaan Debitur yang Telah  
Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 37  
Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Hutang**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh :**

**MARISA RAMADHANI PUSPITASARI**

**NIM : C. 100. 090. 179**

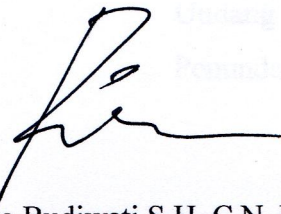
**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2013**

## HALAMAN PENGESAHAN

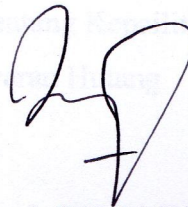
Naskah publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada :

Pembimbing I

Pembimbing II



(Septarina Budiwati S.H., C.N., M.H.)



(Inayah S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, SH., MH)

**Perlindungan Hukum Kreditur Selaku Pemegang Jaminan Fidusia  
Dalam Kepailitan Atas Harta Kekayaan Debitur yang Telah  
Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 37  
Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Hutang**

**MARISA RAMADHANI PUSPITASARI**

**NIM : C. 100. 090. 179**

**Fakultas Hukum**

**Unniversitas Muhammadiyah Surakarta**

**2013**

**ABTRAKSI**

*Di dalam dunia bisnis kebutuhan akan dana merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mempertahankan dan menunjang kelangsungan kegiatan usahanya, sehingga untuk mengatasi persoalan kebutuhan dana tersebut pinjaman modal dalam bentuk utang piutang merupakan solusi yang sering ditempuh oleh pelaku usaha. Persoalan yang timbul kemudian adalah apabila dalam waktu yang telah ditentukan atau sudah dalam keadaan jatuh tempo utang debitor tersebut, akan tetapi debitor justru tidak memiliki kemampuan ataupun kemauan untuk mengembalikan pinjaman berupa utang beserta bunga yang telah ditetapkan tersebut kepada salah satu atau beberapa kreditornya. Seringkali dalam kepailitan terdapat permasalahan yang harus dihadapi oleh para kreditor, adalah untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit, di sisi lain permasalahan yang mungkin dihadapi adalah ketidakmampuan atau adanya itikad buruk dari kurator dan hakim pengawas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit (boedel pailit).*

*Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui perlindungan bagi kreditor pemegang jaminan fidusia terhadap harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang dan mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh kreditur pemegang jaminan fidusia bila*

*debitur dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang*

*Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal yang kualitatif, merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriteria kebenaran koresponden.*

*Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 55 ayat (1) berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang memberi wewenang kepada kreditor preferent untuk melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada setiap benda yang dibebani jaminan kebendaan tertentu. Berdasarkan Pasal 27 ayat (10) dan (3) Undang-undang Fidusia, bahwa dalam kondisi debitur pailit barang masih menjadi milik kreditor, dalam arti merupakan debitur pailit, kreditor tetap berhak untuk mengambil pelunasan dari barang jaminan fidusia tersebut. Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan bahwa hak eksekusi kreditor preferent sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Pelelangan jaminan hutang oleh kreditor separatis baru dapat dilakukan setelah berakhirnya penangguhan tersebut hingga 2 (dua) bulan sejak insolvensi harta pailit. Setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut kewenangan pelelangan beralih kepada curator.*

*Kata kunci : Jaminan Fidusia, Kepailitan, Debitur, Kreditor Preferent, Pelelangan.*

## **ABSTRACT**

*In the world of business needs for funds is a basic requirement to be met by the perpetrator attempts to maintain and support the survival of his business activities, so as to address the question of the need for the loan funds in the form of debts is a solution which is often taken by businessmen. The question that arises then is when the allotted time or already in a State of maturing debts of the debtor, but the debtor thus does not have the ability or the will to return the loan in the form of debt and its interest has been assigned to one or several creditors. Often there are problems in bankruptcy to be faced by the creditors, is to obtain repayment of the debtor against piutangnya has been declared bankrupt, on the other hand, problems which may be encountered is the inability or bad faith of the curator and judge supervisor in conducting clearance and pemberesan property in bankruptcy (bankrupt boedel).*

*The purpose of this research is to know the creditor protection for holders of a fiduciary guarantee of the property of the debtor that has been declared bankrupt according to law No. 38 of 2004 regarding bankruptcy and debt repayment obligations and delay knows what problems encountered by creditors*

*when debtors fiduciary guarantee holder declared bankrupt according to law No. 38 of 2004 regarding bankruptcy and debt payment suspension.*

*Research methods used in this Research is based on legal research conducted with the doctrinal approach to qualitative research is legal, sociological, i.e. does it take to get primary data and find the truth by using the method of inductive thinking and truth kriterium correspondent.*

*The results of this research are Article 55, paragraph (1) by virtue of law No. 38 of 2004 regarding Bankruptcy And Debt Payment Suspension authorize preferent creditors to exercise its own eksekutorialnya based on eksekutorial title attached to each object that certain material guarantee burdened. Based on article 27 paragraph (10) and (3) Fiduciary Law, that in the circumstances the debtor bankrupt goods remain the property of the lender, in the sense of a debtor in bankruptcy, the creditor remains entitled to take repayment of the fiduciary guarantee. Article 55, paragraph (1) Act No. 37 of 2004 about bankruptcy mentions that the rights of the execution creditor preferent as stipulated in article 56, paragraph (1) of the Bankruptcy Act is suspended for a period of not longer than 90 (ninety) days from the date of the bankruptcy Declaration is pronounced putuisan. The auction of debt guarantees by the breakaway new creditors may be made after the expiry of the suspension up to 2 (two) months from the insolvency estate bankrupt. After passing jangka waktu 2 (two) months of the authority the auction goes to the curator.*

*Keywords: Fiduciary security, bankruptcy, debtors, preferent, creditors auction.*

## **A. Pendahuluan**

Debitur selaku pihak yang memerlukan dana akan melakukan pinjaman berupa utang kepada kreditor, seringkali terjadi debitor melakukan utang kepada lebih dari satu kreditor guna memenuhi kebutuhan dana tersebut.

Kepailitan tersebut antara lain untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk tercapainya perdamaian, melakukan negoisasi dengan pihak pembeli sehingga tercapai harga yang optimal dan memberi kesempatan kepada kuratot untuk bekerja secara optimal<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Hadi Subhan. 2002. *Hukum Kepailitan*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. Hal. 499.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk dapat mempelajari dan melakukan telaah yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap hak kreditor untuk dapat memperoleh pelunasan pembayaran piutang yang dimilikinya dari harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Rumusan Masalah penulisan ini adalah sebagai berikut : Bagaimana perlindungan bagi kreditor pemegang jaminan fidusia terhadap harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang?; Permasalahan apa yang dihadapi oleh kreditor pemegang jaminan fidusia bila debitur dinyatakan pailit berdasarkan uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Mengetahui perlindungan bagi kreditor pemegang jaminan fidusia terhadap harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang; Mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh kreditor pemegang jaminan fidusia bila debitur dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang; tujuan subyektif adalah untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian; untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang hukum kepailitan khususnya

mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berkaitan dengan jaminan fidusia; untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang ilmu hukum yang sudah penulis peroleh, khususnya tentang teori-teori di bidang hukum perdata terutama dalam hukum fidusia; untuk memperoleh data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu: Manfaat Praktis sebagai berikut dengan penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai masukan serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia dan bagi masyarakat itu sendiri dan manfaat Teoritis, dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang kualitatif.<sup>2</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang ingin menggambarkan tentang perlindungan hukum kreditur selaku pemegang jaminan fidusia. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan metode penelitian kepustakaan. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Hukum**

---

<sup>2</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara)”<sup>3</sup>. Menurut Philip S. James hukum adalah “Sekumpulan aturan untuk membimbing perilaku manusia yang diterapkan dan ditegakkan di antara anggota suatu negara”<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Utrechts, “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”<sup>5</sup>.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan seperangkat peraturan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang atau pemerintah, berupa perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat pada suatu negara dan dapat diancam pelaku pelanggarnya dengan pemberian sanksi.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan

---

<sup>3</sup> W.S Purwodarminto, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hal 235

<sup>4</sup> Ade Maman Suherman. 2008, *Teori Dasar dan Perkembangan Hukum Indonesia*, Grafika Press. Surabaya. 2008, hal 6-7

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 7



keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi<sup>6</sup>.

Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif<sup>7</sup>.

Perlindungan hukum yang represif biasanya merupakan perlindungan hukum yang paling efektif bagi rakyat untuk memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya dari pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi diantara mereka.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty. Jogjakarta hal 77.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung. hal 2-3

manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila<sup>8</sup>.

### 3. Pengertian Kepailitan

Dalam bahasa Prancis, istilah "*faillite*" artinya pemogokan atau kemacetan dalam pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutangnya disebut *Le failli*. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillite* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam Inggris dipergunakan istilah *to fail*, dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah *failure*<sup>9</sup>

Pengertian kepailitan menurut Rahayu Hartini, adalah sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai utang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal 20.

<sup>9</sup> Sunarmi, 2010, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar Jogjakarta, hal23

<sup>10</sup> Rahayu Hartini, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Radja GrafindoPersada, Jogjakarta, hal 6).

Menurut Munir Fuady, “Pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor”<sup>11</sup>.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengelolaan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

#### **1. Akibat Kepailitan Bagi Debitor**

Adanya pernyataan kepailitan yang diputus oleh Pengadilan Niaga menyebabkan beberapa akibat yang harus dihadapi oleh debitor, menurut Undang-undang No. 37 tahun 2004 diantaranya adalah: debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 ayat (1)), semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 ayat (1)), untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hal 8)

kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 41 ayat (1)).

## **2. Pengertian Jaminan Fidusia**

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*fiducie*", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Dalam beberapa literatur fidusia sering disebut dengan istilah *eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia adalah : "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda".

## **3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia**

Objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu<sup>12</sup>: benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud; dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Subjek dalam jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi

---

<sup>12</sup> Ibid. Munir Fuady. Hal 22

yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia<sup>13</sup>.

### C. Hasil Penelitian

1. Perlindungan bagi kreditor pemegang jaminan fidusia terhadap harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Perlindungan hukum terhadap kreditor tersebut diberikan untuk melindungi kreditor terhadap adanya itikad buruk atau kesalahan, baik yang disebabkan kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan pihak-pihak tertentu dalam kepailitan yang dapat mengurangi nilai *boedel* pailit, sehingga merugikan kreditor konkuren. Perlindungan hukum tersebut adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

Dalam kasus kepailitan dimana debitur tidak lagi mampu membayar kewajibannya, maka pembayaran terhadap hutang yang dimiliki diutamakan terhadap kreditor separatis. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditor pemegang

---

<sup>13</sup> Ibid Munir Fuady. Hal 22

<sup>14</sup> Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya merupakan karakteristik kreditor separatis.

Apabila debitur Pemberi Fidusia mengalami kepailitan, maka menurut teori hukum jaminan tersebut, benda jaminan fidusia berada di luar boedel pailit. Berdasarkan Pasal 27 ayat ( 3 ) Undang-undang Fidusia menentukan bahwa hak untuk didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Di dalam praktek perkreditan, barang-barang persediaan dan barang-barang bergerak milik debitur yang memperoleh kredit hampir selalu dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia. Hak Jaminan Fidusia memberikan secara hukum hak kepemilikan kepada kreditor atas barang-barang yang dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia itu, tetapi penguasaan atas barang-barang itu ada pada debitur. Dengan demikian, bagi benda-benda-benda yang dibebani dengan Hak jaminan berupa fidusia, kurator tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penjualan atas benda-benda tersebut. Bukankah benda-benda yang dibebani oleh hak jaminan fidusia itu secara hukum adalah milik kreditor dan bukan milik debitur.

2. Permasalahan yang dihadapi oleh kreditor pemegang jaminan fidusia bila debitur dinyatakan pailit berdasarkan berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kreditor guna memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan pemenuhan pembayaran piutang yang dimilikinya atas harta kekayaan debitor pailit (*boedel pailit*).

Dalam perjanjian hipotik, kreditor juga bisa memiliki wewenang untuk menjual sendiri benda jaminan, namun ini harus diperjanjikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1178 ayat 2 BW. Berarti kewenangan ini bukan lahir dari undang-undang, tetapi harus dimunculkan dalam perjanjian oleh para pihak dalam wujud pemberian kuasa oleh debitur kepada kreditor untuk menjual sendiri benda agunan bila terjadi wanprestasi. Jelas cara ini seperti halnya dalam parate eksekusi gadai, sangat menguntungkan kreditor dalam upayanya untuk memperoleh pelunasan dengan mudah dan sederhana.

Sebenarnya dengan grosse akta hipotik sedasar dengan ketentuan Pasal 224 HIR, kreditor juga memiliki wewenang untuk menjual benda jaminan dikarenakan akta tersebut memiliki ketentuan eksekutorial. Dengan fiat pegadaian, maka kreditor dapat mengambil pelunasan dari pelelangan yang dilakukan oleh juru lelang. Berdasarkan aturan yang berlaku itu, maka sebenarnya kemudahan dan penyederhanaan pengambilan pelunasan bagi kreditor manakala debitur wanprestasi, sangat mendukung perputaran roda ekonomi yang menghendaki efisiensi. Namun sayangnya, dalam pelaksanaannya, baik

grosse hipotik ataupun kuasa menjual ex Pasal 1178 ayat 2 BW kadang terganjal oleh faktor-faktor yang masih menjadi bahan perbedaan. Jelas gambaran yang demikian ini membikin wajah hukum menjadi sedikit kusam untuk dihadiri dalam perjamuan era pertumbuhan ekonomi yang menghendaki efisiensi tinggi.

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 55 ayat (1) berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang memberi wewenang kepada kreditor preferent untuk melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada setiap benda yang dibebani jaminan kebendaan tertentu; Berdasarkan hal tersebut apabila Debitur wanprestasi atau cidera janji atau Pailit, maka eksekusi yang doatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

##### **Saran**

Perlu adanya penegasan mengenai masa penangguhan hak untuk melaksanakan eksekusi bagi kreditor preferent, termasuk penerima jaminan fidusia; Perlu diperhatikan kedudukan kreditor penerima jaminan fidusia dalam proses kepailitan mengingat dalam hal obyek jaminan fidusia tidak ada lagi; Kreditor penerima jaminan fidusia agar diberikan hak sama



dalam kreditur tanpa melepaskan hak preferennya, sehingga dapat secara bersama-sama dengan kreditur lain melakukan restrukturisasi atau perdamaian dengan debitur Pailit

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman. 2008, *Teori Dasar dan Perkembangan Hukum Indonesia*, GrafikaPress. Surabaya. 2008.
- Hadi Subhan. 2002. *Hukum Kepailitan*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hal 8)
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung. hal 2-3
- Rahayu Hartini, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Radja GrafindoPersada, Jogjakarta, hal 6).
- SoetandyoWignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Sudikno Mertokusumo, 2003. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty. Jogjakarta.
- Sunarmi, 2010, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar Jogjakarta.
- Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
- W.S Purwodarminto, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional